

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

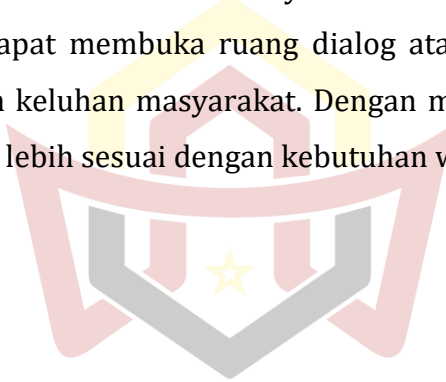
Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyash Idariyah (studi kasus Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya) dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.1.1 Ada beberapa faktor pendukung dan hambatan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Wali Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Faktor pendukungnya adalah adanya keterlibatan pemerintah nagari dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan sudah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelayanan. Kemudian faktor yang menjadi hambatan nya adalah kurangnya kualitas dan jumlah tenaga kerja di tingkat nagari yang bertugas dalam layanan publik, minimnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan peraturan daerah ini dan kurangnya fasilitas seperti peralatan kantor yang kurang cukup dan akses internet yang sering hilang timbul, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal sehingga layanan publik tidak dapat berjalan efektif.
- 5.1.2 Berdasarkan perspektif Siyash Idariyah, pelayanan publik yang diberikan sudah mencerminkan nilai-nilai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) meskipun belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka dalam pengenalan terhadap Peraturan Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam dalam mengelola pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah SWT

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar Pemerintah Nagari Tiumang lebih meningkatkan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Nagari dan pembinaan bagi seluruh Perangkat Nagari agar lebih memahami standar pelayanan publik sesuai peraturan yang berlaku. perbaiki sarana dan prasarana pelayanan Kantor Wali Nagari seperti menyediakan fasilitas pelayanan yang nyaman dan lengkap, seperti ruang tunggu, papan informasi, dan layanan digital. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih puas dan merasa dihargai. Dan libatkan masyarakat dalam proses pelayanan Pemerintah Nagari dapat membuka ruang dialog atau forum warga untuk mendengar saran dan keluhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pelayanan publik bisa lebih sesuai dengan kebutuhan warga.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Onny Siagian, d. (2021). *Leadership Di Era Digital. Sumatera Barat : Insan Cendekia* .
- As, Z. R. (t.thn.). "Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pasaman No. 13 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Perspektif Siyasa Dusturiyah" . . 2024.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku kita.
- Djazuli, A. (2003). *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Eka. (2017). "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Rumbai Pesisir." dalam *Jurnal Naira*, Volume 9. No. 2.
- Hasbi, A.-S. (1974). *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasibuan, R. A. (2023). *Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasa*.
- Joko Susanto, Z. A. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Jurnal Administrasi Negara. (Volume 25. No 2)*.
- Kamaruddin Sellang, d. (2019). *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . Jawa Timur : Srikaya*.
- Kapioru, H. E. (2014). *Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Volume III No. 1.

- Kurniawan, R. C. (2016). *Inovasi Kualitas Publik Pemerintahan Daerah. Jurnal Fiat Justisia Of Law. (Volume 10, hlm,571).*
- Lubis, A. H. (t.thn.). *Efektivitas Pelayanan E-KTP Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal). 2021.*
- Mamonto, N. (2018). *Impelemntasi Pembangunan Infrastuktur Desa Dalam pembangunan dana desa tahun 2017 (studi) desa Ongkau II Kecamatan Sinisayang Kabupaten Minahasa Selatan, Volume 1. No1 .*
- Marande, Y. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Gebangrejo .*
- moh, N. (2013). *Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.*
- Nurjaya, d. (2020). *Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Ekonomi. (Volume 2 Nomor 1).*
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Solo: UNISRI Press.*
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh Siyasah : ajaran dan pemikiran " Jakarta PT Raja Grafindo Persada.*
- Qabtahi, M. a. (2003). *Ushul al-Idariyah asy Syar'iyah. . Bayt ats Tsaqifah.*
- Rinaldi, R. (2012). *ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (studi pada biro umum sekretariat daerah provinsi sumatera utara), Vol 1 No 1.*
- Roman Hadi Saputra, S. (2021). *Tantangan Informasi Berbasis Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal : Administrasi Negara.*

Rukayat, Y. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependidikan Kecamatan Pasir Jambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (ILMIA) (Volume 2, hlm, 57).*

S, M. A. (1992). Cetakan pertama. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.*

Sari, H. D. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.*, Universitas muhammadiyah sidenreng rappang, 1-25.

Setiawan, G. (2014). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sinambela, L. P. (2005). PT Bumui Aksara. *Reformasi Pelayanan Publik.*

Sriyana. (2022). *Kepemimpinan dalam Pemerintahan.* Cv Feniks Muda Sejahtera.

Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Syahida, B. A. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang (studi kasus di Kelurahan Tanjung Unggat),* Undergraduate Thesis Universitas Negeri Padang.

Thamrin, A. (2013). *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tulungen, E. E. (2022). *Peran Kepemimpinan Digital. Jurnal Emba. (Volume 10.No. 2).*

Wahab, S. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Negara.*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wulan Insan Kamilia, d. (2022). *Peran Kepemimpinan Wali Nagari terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Jurnal Of Multidicsiplinary Research And Development. (Volume 4,hlm41.)*.

Yati, L. M. (t.thn.). Keterbukaan Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman). 2021.

Zikrullah, F. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah*.

